

Vol. 1 – Edisi 3

PDRD LENS

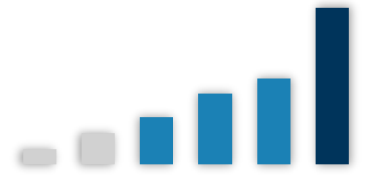
Navigasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Dinamika Perekonomian



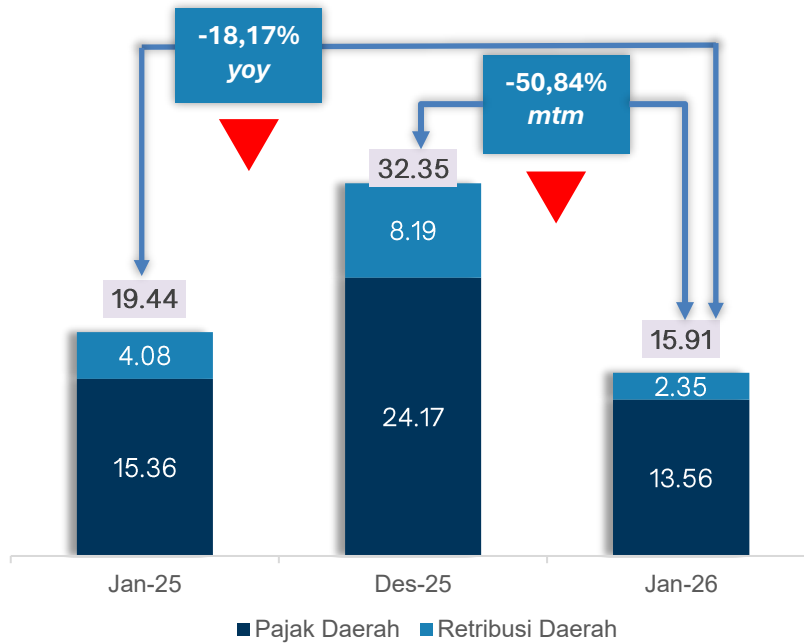
MADET

2026

PERFORMANCE HIGHLIGHTS



Realisasi PDRD Januari 2025 – 2026 (Triliun Rupiah)



Sumber: SIKD, data per 27 Maret 2026

Kinerja penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada awal tahun 2026 mengalami kontraksi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maupun bulan sebelumnya. Penurunan ini sebagai implikasi dari normalisasi atas aktivitas ekonomi yang sebelumnya sangat intens pada Desember 2025. Pajak Daerah terkontraksi 11,75% secara yoy menjadi Rp13,56 Triliun. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, penurunannya mencapai 43,90%. Demikian halnya Retribusi Daerah, realisasi penerimaannya pada Januari 2026 sebesar Rp2,35 Triliun, terkontraksi hingga 71,31% dari bulan sebelumnya. Sementara itu, terhadap periode yang sama tahun sebelumnya, penerimaan Retribusi Daerah Januari ini turun sebesar 42,37%.

MONTHLY PATTERN



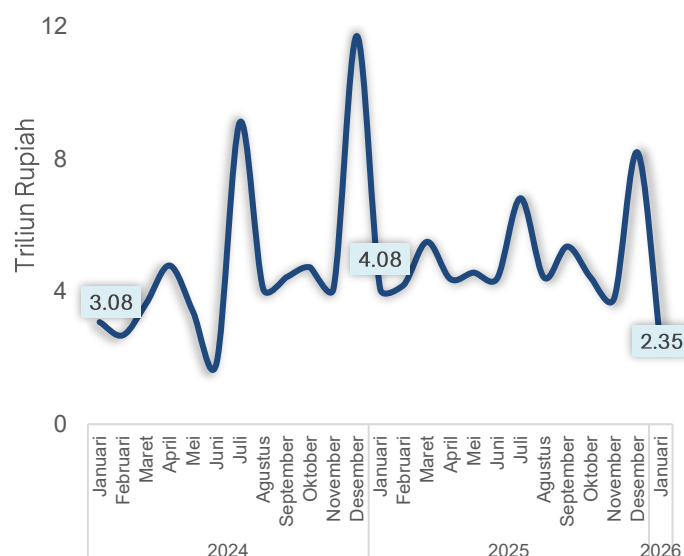
Pola Realisasi Pajak Daerah Bulanan



Sumber: SIKD, data per 27 Maret 2026

Penerimaan Pajak Daerah bulan Januari 2026 mengikuti pola musiman penerimaan Pajak Daerah tahunan. Secara historis, bulan Januari selalu memberikan kontribusi penerimaan Pajak Daerah yang relatif lebih kecil dibandingkan bulan lainnya. Namun, dalam tiga tahun terakhir intensitas penerimaan pajak daerah menunjukkan tren penurunan yang semakin dalam. Apabila dilihat dari polanya, rendahnya penerimaan bulan Januari diakibatkan oleh adanya *high base effect* di bulan Desember sebagai dampak mobilitas masyarakat yang meningkat karena ditunjang oleh hari besar keagamaan dan libur anak sekolah.

Pola Realisasi Retribusi Daerah Bulanan



Sumber: SIKD, data per 27 Maret 2026

Pola serupa juga terjadi pada penerimaan Retribusi Daerah, dimana Januari menjadi salah satu periode dengan intensitas penerimaan terendah dibandingkan bulan-bulan lainnya. Efek normalisasi pasca libur bulan Desember memberikan tekanan yang cukup kuat pada aktivitas masyarakat pada bulan Januari ini, sehingga berdampak pada terkontraksinya penerimaan retribusi. Selain itu, dalam pola pengelolaan keuangan, periode Januari umumnya masih menjadi masa persiapan administrasi keuangan daerah, termasuk administrasi penerimaan atas layanan-layanan retribusi.

REVENUE DETAIL



Realisasi dan Pertumbuhan Pajak Daerah Bulan Januari (yoy)

dalam Triliun Rupiah

Jenis Pajak ¹⁾	2025	2026	Growth (%)	Andil Pertumbuhan (%)
BPHTB	1.07	1.32	22.95% ▲	1.60% ▲
Pajak Rokok	0.02	0.03	22.36% ▲	0.03% ▲
PBB-P2	0.37	0.42	14.69% ▲	0.35% ▲
PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	0.24	0.26	8.20% ▲	0.13% ▲
PBJT Jasa Parkir	0.07	0.07	4.80% ▲	0.02% ▲
PBJT Jasa Perhotelan	1.05	1.01	-3.59% ▲	-0.25% ▲
Pajak Air Tanah	0.08	0.08	-4.34% ▼	-0.02% ▼
PBJT Makanan dan/atau Minuman	1.60	1.53	-4.38% ▼	-0.46% ▼
Pajak Reklame	0.23	0.21	-6.33% ▼	-0.09% ▼
Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB	0.18	0.17	-7.46% ▼	-0.09% ▼
PBBKB	2.69	2.38	-11.59% ▼	-2.03% ▼
PBJT Tenaga Listrik	1.80	1.58	-11.88% ▼	-1.39% ▼
Pajak Sarang Burung Walet	0.00	0.00	-15.11% ▼	0.00% ▼
BBNKB dan Opsen BBNKB	2.05	1.71	-16.74% ▼	-2.24% ▼
PKB dan Opsen PKB	3.76	2.71	-27.98% ▼	-6.85% ▼
Pajak Air Permukaan	0.11	0.07	-38.20% ▼	-0.28% ▼
Pajak Alat Berat	0.03	0.00	-85.26% ▼	-0.18% ▼

Sumber: SIKD, data per 27 Maret 2026

Terkontraksinya penerimaan Pajak Daerah secara akumulatif dikontribusikan oleh pertumbuhan negatif dua belas jenis Pajak Daerah pada periode Januari ini. Pajak berbasis kendaraan bermotor yaitu PKB dan BBNKB beserta Opsennya memberikan andil tertinggi atas kontraksi penerimaan yang terjadi. Sementara itu dari sisi pertumbuhannya, PAB dan PAP mencatatkan persentase penurunan terdalam dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

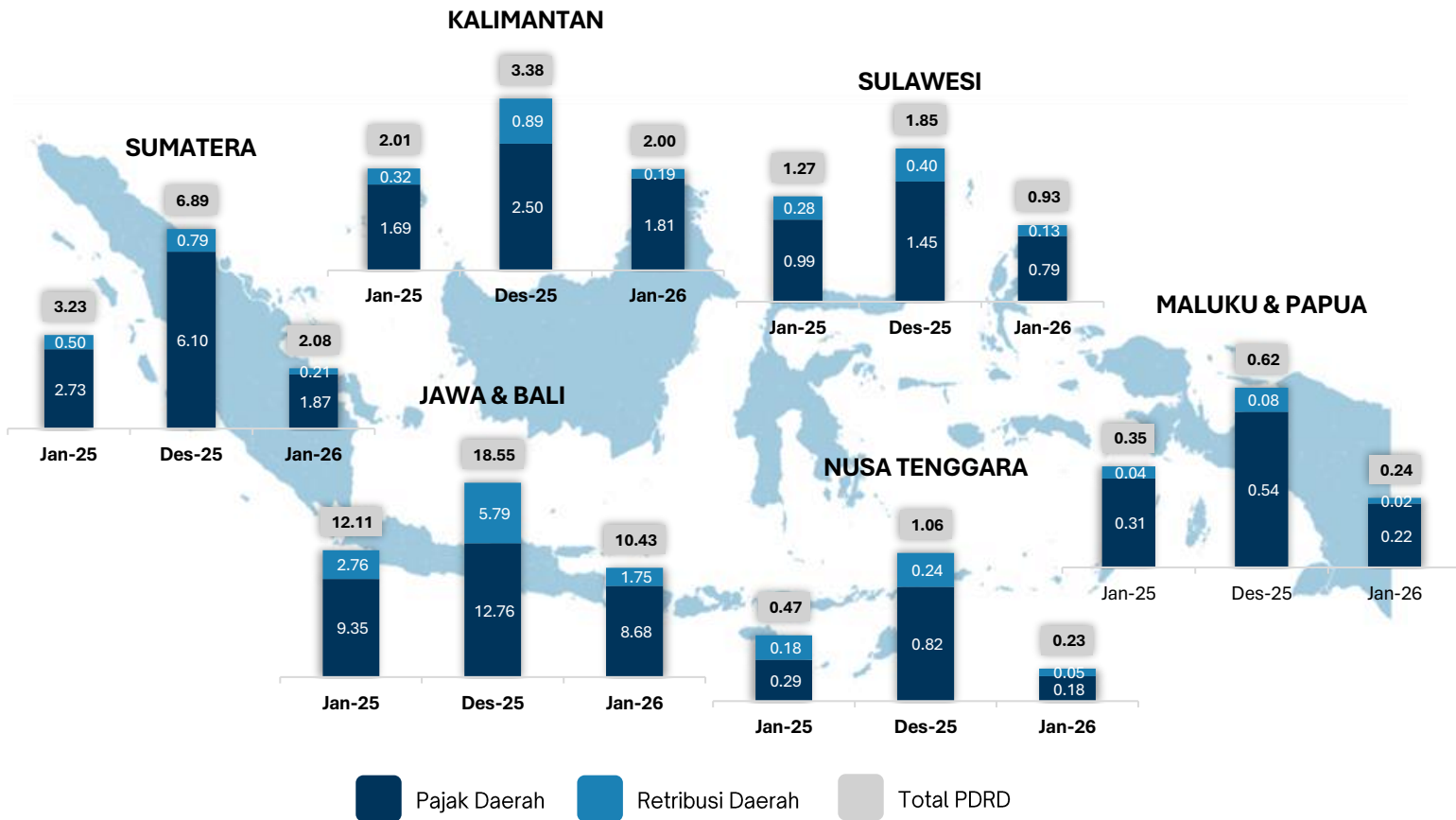
Pada Januari ini, hanya ada lima jenis pajak yang mencatatkan pertumbuhan positif, yaitu BPHTB, Pajak Rokok, PBB-P2, PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan serta PBJT atas Jasa Parkir. BPHTB memiliki andil yang paling besar terhadap pertumbuhan penerimaan dengan peningkatan sebesar 22,95% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan terjadi peningkatan transaksi peralihan hak atas tanah maupun bangunan baik dari sisi kuantitas maupun nilai transaksi secara yoy. Sementara itu, pertumbuhan penerimaan Pajak Rokok pada bulan Januari ini terjadi karena adanya penyetoran atas bagian penerimaan tahun sebelumnya yang baru dapat dilakukan setelah terpenuhinya syarat administratif penyetoran dari beberapa pemerintah daerah.

¹⁾ PBJT: Pajak Barang Jasa Tertentu, PBB P2: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, PBBKB: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, MBLB: Mineral Bukan Logam dan Batuan, PKB: Pajak Kendaraan Bermotor, BPHTB: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, BBNKB: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, PAB: Pajak Alat Berat

SPATIAL ANALYSIS



Pertumbuhan PDRD Spasial (yoy dan mtm)



Sumber: SIKD, data per 27 Maret 2026

Mengikuti pola musiman penerimaan nasional awal tahun, penerimaan PDRD bulan Januari di keseluruhan wilayah mengalami kontraksi. Wilayah Nusa Tenggara mengalami penurunan yang paling dalam yaitu sebesar 50,92% secara yoy. Sementara itu, wilayah Kalimantan mengalami kontraksi yang paling rendah yaitu 0,54% secara yoy, bahkan penerimaan Pajak Daerah Kalimantan justru tumbuh positif 7,24% yoy di tengah kontraksi seluruh komponen PDRD secara nasional.

RELATED INDICATORS



Tahun 2026 diawali dengan sinyal positif aktivitas perekonomian. Hal ini ditandai dengan beberapa indikator yang menunjukkan kinerja yang cukup baik.

Dari sisi produksi, *Purchasing Managers' Index* Manufaktur (PMI Manufaktur) masih berlanjut pada fase ekspansi. Bulan Januari ini PMI Manufaktur berada pada angka 52,6, terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan Januari tahun sebelumnya dan bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal ini sekaligus melanjutkan ekspansi manufaktur sepanjang enam bulan berturut-turut sejak Agustus tahun sebelumnya. Akselerasi atas permintaan domestik ditengarai menjadi penyebab ekspansi produksi dari sektor manufaktur. Meskipun tidak berkaitan langsung dengan basis Pajak Daerah, kenaikan PMI Manufaktur dapat mendorong permintaan atas barang atau jasa yang menjadi basis pemungutan Pajak Daerah.

Dari sisi konsumsi, daya beli masyarakat masih cukup terjaga pada periode awal tahun 2026 ini. Hal ini terindikasi dari *Retail Sales Index* (RSI) yang tumbuh sebesar 5,7% yoy, meskipun sedikit berkontraksi dari bulan sebelumnya karena normalisasi konsumsi. Pertumbuhan RSI ini terutama didorong oleh kenaikan penjualan barang budaya dan rekreasi, serta makanan, minuman, dan tembakau.

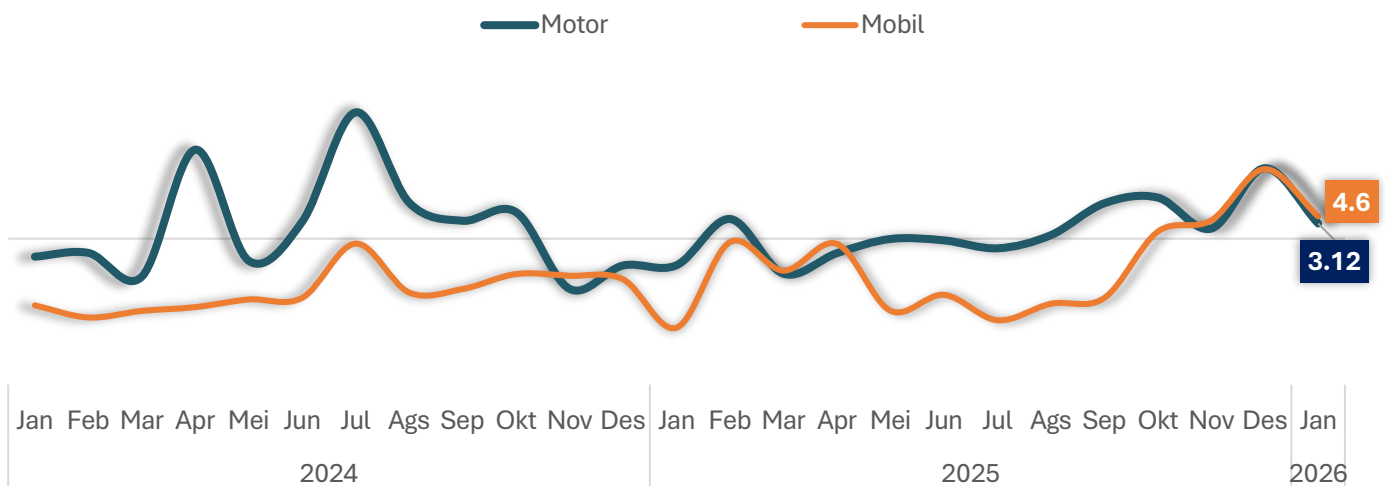


VEHICLES SALES



Sektor otomotif yang menjadi salah satu *leading indicator* aktivitas ekonomi menunjukkan pertumbuhan yang persisten. Penjualan kendaraan roda empat pada Januari 2026 mencapai 67 ribu unit. Capaian ini sekaligus melanjutkan tren positif pertumbuhan penjualan selama empat bulan berturut-turut secara yoy. Kinerja positif juga terjadi pada penjualan kendaraan bermotor roda dua. Pada Januari ini, tercatat sebanyak 477,76 ribu unit kendaraan roda dua yang terjual. Dengan demikian, selama enam bulan berturut-turut penjualan kendaraan bermotor tumbuh positif secara yoy.

Pertumbuhan Penjualan Kendaraan Bermotor Baru (%yoy)



Sumber: Gaikindo dan AISI

Kinerja pada bulan Januari ini sekaligus menjadi sinyal optimisme karena selama dua tahun ke belakang, selalu terjadi kontraksi penjualan kendaraan bermotor pada bulan Januari secara yoy. Peningkatan penjualan kendaraan bermotor berpotensi memperluas basis Pajak Daerah, khususnya pada BBNKB dan PKB. Namun, agar tambahan basis pajak tersebut benar-benar dapat dikonversi menjadi penerimaan daerah, diperlukan sistem dan administrasi pemungutan yang semakin kuat dan andal.

VEHICLES TAX COMPLIANCE



Kepatuhan Pembayaran Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor (Unit)

Kategori	Januari 2025	Januari 2026	Growth
Lunas	3,477,074	3,285,638	-5.5%
Tahun lalu	368,539	355,385	-3.6%
Kendaraan Tahun berjalan + Baru	3,108,535	2,930,253	-5.7%
Belum Lunas	6,399,580	6,732,078	5.2%
Kendaraan Aktif	9,876,654	10,017,716	1.4%
Tingkat Kepatuhan	35.2%	32.8%	-2.4%

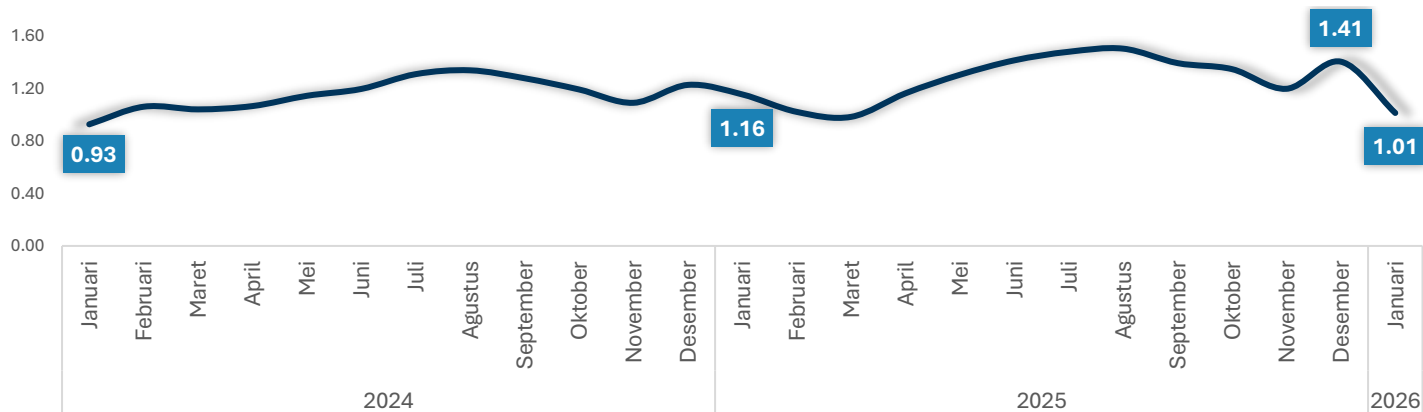
Sumber: Jasa Raharja

Tingkat kepatuhan pembayaran PKB pada bulan Januari tercatat mengalami penurunan. Jumlah kendaraan yang telah melunasi kewajiban PKB menurun sebesar 5,5% atau masih terdapat selisih lebih dari 191 ribu unit kendaraan yang belum melakukan pelunasan untuk periode jatuh tempo Januari dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan tingkat kepatuhan pembayaran PKB tersebut diperkirakan antara lain karena sebagian masyarakat cenderung menunggu adanya kebijakan relaksasi atau insentif pembayaran PKB berupa penghapusan pokok atau denda PKB yang secara historis diumumkan oleh pemerintah daerah di awal tahun. Hal ini mengindikasikan perlunya mendesain kebijakan pemberian insentif Pajak Daerah yang tepat, khususnya berbasis *reward* atau *ability to pay*. Turunnya tingkat kepatuhan ini berdampak pada realisasi penerimaan PKB, yang hingga saat ini belum dapat terkompensasi oleh peningkatan penjualan kendaraan bermotor baru pada Januari 2026.

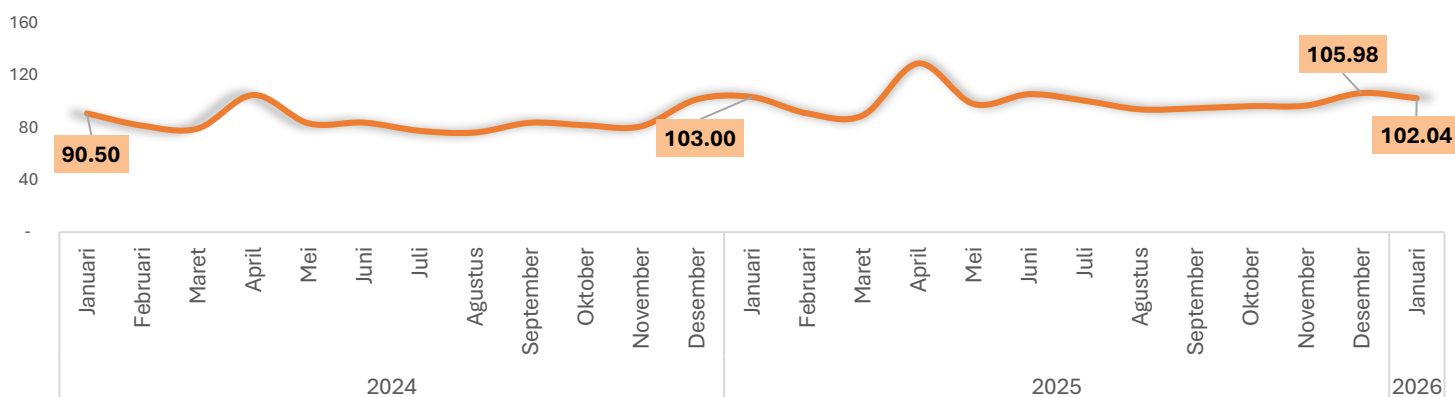
TOURISM & HOSPITALITY TREND



Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Juta)



Perkembangan Kunjungan Wisatawan Nusantara (Juta)



Sumber: BPS

Pada sektor pariwisata, terdapat penurunan perjalanan wisata mancanegara maupun nusantara di bulan Januari baik secara *yoy* maupun *mtm*. Pola musiman tiap tahun masih berlanjut, dimana selalu terjadi penurunan dari bulan Desember. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada awal tahun 2026 ini sebanyak 1,01 juta orang, menurun 12,25% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan berkontraksi 27,8% secara *mtm*. Hal yang sama, perjalanan wisatawan nusantara juga mengalami penurunan pada bulan Januari ini. Mengikuti pola musiman awal tahun, dengan jumlah perjalanan 102,04 juta pada Januari 2026, kunjungan wisatawan nusantara berkontraksi 3,72% dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan tumbuh negatif 0,93% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.



Tingkat Penghunian Kamar Hotel (%)

Klasifikasi Hotel	Jan-25	Des 25	Jan-26
Bintang 1	33.60	34.52	34.24
Bintang 2	46.31	51.34	46.04
Bintang 3	46.54	54.83	46.40
Bintang 4	51.45	60.27	49.93
Bintang 5	52.51	59.83	49.73
TPK Bintang	48.38	56.12	47.53
TPK Non Bintang dan Akomodasi Lainnya	24.39	27.05	24.48
TPK (Total)	38.32	42.13	36.06

Sumber: BPS

Turunnya kunjungan wisatawan berdampak pada penurunan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel.

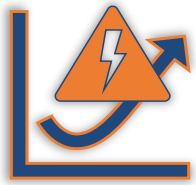
Penurunan ini terutama disebabkan karena turunnya TPK hotel bintang secara umum. Sementara itu, TPK hotel non bintang justru tercatat tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan melihat capaian TPK masing-masing klasifikasi hotel, tampak terdapat kecenderungan pergeseran preferensi pemilihan akomodasi ke akomodasi bintang 1 atau non bintang. Satu fenomena yang cukup menarik bahwa dalam kondisi penurunan jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat penghunian kamar, ternyata rata-rata lama menginap pada hotel bintang pada Januari 2026 ini meningkat secara yoy dari 1,57 hari menjadi 1,59 hari. Peningkatan ini terutama dikontribusikan oleh wisatawan mancanegara.

Penurunan jumlah wisatawan yang diikuti penurunan TPK Hotel tentunya memicu penurunan basis pajak PBJT atas Jasa Perhotelan dan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman sehingga menurunkan penerimaan pajak terkait. Namun demikian, kondisi ini diharapkan hanya berlangsung dalam jangka pendek karena periode selanjutnya akan dihadapkan pada mobilitas masyarakat yang meningkat sehingga mampu menumbuhkan basis PBJT atas Jasa Perhotelan maupun PBJT atas Makanan dan/atau Minuman.

ENERGY CONSUMPTION



PENJUALAN LISTRIK



▼ **7,03%**

RUMAH TANGGA ▼ **18,49%**

BISNIS ▲ **4,12%**

INDUSTRI ▲ **2,12%**

PENJUALAN BBKB



▼ **5,03%**

Jan-2025 **105,9**

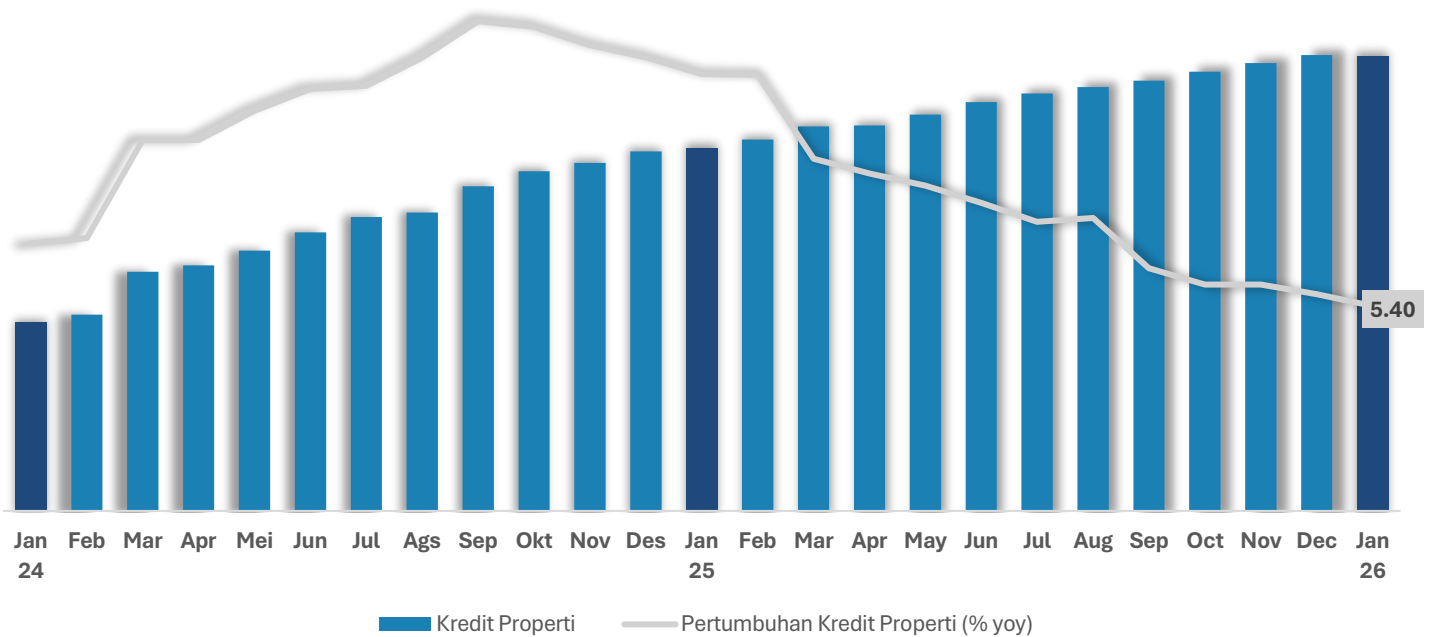
Jan-2026 **100,3**

Indikator lain yang merepresentasikan basis pajak PDRD adalah konsumsi energi. Pada Januari ini, konsumsi energi baik tenaga listrik maupun Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) berkontraksi. Penjualan listrik pada bulan Januari mengalami kontraksi hingga 7,03% yoy. Kontraksi tersebut disebabkan konsumsi listrik rumah tangga turun hingga 18,49% yoy. Namun demikian, konsumsi Listrik pada kategori bisnis dan industri tercatat tetap tumbuh masing-masing 4,12% dan 2,12% yoy. Sementara itu, konsumsi BBKB yang tercermin dalam RSI untuk komoditas BBKB berkontraksi sebesar 5,03% yoy, dari 105,9 pada Januari 2025 menjadi 100,3 pada Januari 2026. Penurunan konsumsi sektor energi ini berimplikasi pada penurunan basis Pajak Daerah sehingga memberikan tekanan pada penerimaan Pajak Daerah khususnya PBJT atas Tenaga Listrik dan PBBKB.



Realisasi dan Pertumbuhan Kredit Properti

dalam Miliar Rupiah



Sumber: SKKI, Bank Indonesia

Sementara itu, sektor properti menunjukkan sinyal positif pada Januari 2026. Meskipun terjadi perlambatan, kredit properti tetap tumbuh 5,4% secara yoy. Kenaikan ini didorong oleh kredit kepemilikan rumah tapak terutama untuk tipe 21 m² hingga 70 m² yang tumbuh di atas 6,5% yoy. Kenaikan tersebut sekaligus meredam kontraksi kredit properti pada hunian rumah tapak tipe s.d. 21 m². Saat ini, 70,88% kepemilikan rumah diperoleh melalui kredit perbankan sehingga tumbuhnya kredit ini menjadi tanda meningkatnya basis penerimaan BPHTB. Respon penerimaan BPHTB pun sejalan dengan peningkatan basis pajak ini.

PENANGGUNG JAWAB

Lydia Kurniawati Christyana

TIM PENULIS

1. Guruh Panca Nugraha
2. Catur Panggih Pamungkas
3. Ummi Zulianti
4. Satriyo Ari Raharjo
5. Puput Nurhayati
6. Putra Mulia Rahmat
7. Trianto Budi Utama
8. Muhammad Fawwaz Ananda



PDRD LENS

Navigasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Dinamika Perekonomian



Diterbitkan Tahun 2026
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta